

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.43/Menhut-IT/2012
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB									
NO	RUMAH LINGKUP	DINAS KABUPATEN/ KOTA	RUMAH LINGKUP/ WALIKOTA	DINAS PROVINSI	GUBERNUR	UPT BPDAS	DETIK BUK	DITIM BUK	MENTERI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyapar Areal Kerja Lintas Kemasyarakatan	Fasilitas : a. Pembentukan dan pengujian kelompok masyarakat b. Pengajuan permohonan izin	Usulan Perumahan areal kerja IUKM Kepada Menteri	Membantu Fasilitas : a. Pembentukan dan pengujian kelompok masyarakat b. Pengajuan permohonan izin	Usulan perumahan areal kerja kepada Menteri untuk Areal yang lintas Kabupaten/ Kota	a. Koordinasi perencanaan areal kerja IUKM b. Fasilitas usulan areal kerja IUKM	a. Verifikasi peta usulan areal kerja IUKM b. Penyiapan peta areal kerja IUKM	a. Penetapan Tim Verifikasi b. Pelaksanaan Verifikasi c. Pembinaan dan pengendalian	a. Kelengkapan pelaksanaan HKM b. Kepuasan Penetapan Areal Kerja HKM
2	Perizinan Hutan Kemasyarakatan	Penyapar izin Usaha pemanfaatan IUKM	Memberikan izin Usaha pemanfaatan IUKM	Penyapar izin Usaha pemanfaatan IUKM untuk areal lintas Kabupaten/ Kota	Memberikan izin Usaha pemanfaatan IUKM untuk areal lintas Kabupaten/ Kota	Fasilitas pemberian izin usaha pemanfaatan HKM	Pembinaan dan pengendalian	Kebijakan pelaksanaan IUKM	

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB											
NO	RUANG LINGKUP	DINAS KABUPATEN/KOTA	BUPATI/WALIKOTA	DINAS PROVINSI	GUBERNUR	UPT HPDAS	DITJEN BUK	DITJEN PLANOLOGI	DITJEN UPDAS PS	MENTERI	KETERANGAN
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rencana Umum Hutan Kehutanan	Fasilitasi penyusunan Rencana Umum	Mengesahkan Rencana Umum	Fasilitasi penyusunan Rencana Umum untuk areal lintas Kabupaten/Kota	Mengesahkan Rencana Umum untuk areal lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyusunan Rencana Umum			Pertimbangan dan pengendalian	Ketijaksanaan HKH	
4	Rencana Operasional Hutan Kehutanan	a. Fasilitasi penyusunan Rencana Operasional b. Mengesahkan Rencana Operasional	Mengesahkan Pejabat Pengesahan Rencana Operasional	a. Fasilitasi Penyusunan Rencana Operasional b. Mengesahkan Rencana Operasional untuk areal lintas Kabupaten/Kota	Mengesahkan Pejabat Pengesahan Rencana Operasional untuk areal lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyusunan Rencana Operasional			Pertimbangan dan pengendalian	Ketijaksanaan pelaksanaan IHH	
5	Pelaksanaan Pemantauan Hutan Kehutanan	Fasilitasi : a. Teknologi budidaya hutan dan Pengolahan hasil hutan b. Pendidikan dan latihan c. Akses Terhadap pasar dan modal d. Pengembangan Usaha	Pertimbangan dan pengendalian	Fasilitasi : a. Teknologi budidaya hutan dan Pengolahan hasil hutan b. Pendidikan dan latihan c. Akses Terhadap pasar dan modal d. Pengembangan Usaha	Pembinaan dan pengendalian	Bimbingan Teknis	1. Pembinaan dan pengendalian penatansahaan Hasil Hutan (gayu dan buahan kayu) 2. Penyediaan Tenaga Teknis (GANIS)			Ketijaksanaan pelaksanaan pemanfaatan IHH	

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.43/Menhut II/2012
TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN DESA**

No	RUANG LINGKUP	DINAS KABUPATEN/ KOTA	BUPATI/ WALIKOTA	DINAS PROVINSI	TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB								KETERANGAN
					GOVERNUR	UPT BPDA	DITJEN BUK	DITJEN PLANOLOGI	DITJEN BPDAS-PS	MENTERI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pentapan Areal Kerja Hutan Desa	a. Fasilitas pemberlakuan dan penguatan lembaga desa b. Fasilitas penggalan permohonan izin c. Pelaksanaan verifikasi	Usulan permohonan areal kerja Hutan Desa Kegada Menteri	a. Memantau fasilitas pembantuan dan penguatan lembaga desa b. Memantau fasilitas penggalan permohonan izin c. Pelaksanaan verifikasi	Usulan permohonan areal kerja Hutan Desa Lintas Kabupaten/ Kota	a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi b. Koordinasi pemantauan areal kerja Hutan Desa c. Penilaian usulan areal kerja Hutan Desa d. Pelaksanaan verifikasi		a. Verifikasi peta usulan areal kerja Hutan Desa b. Penyusunan peta areal kerja Hutan Desa	a. Penetapan Tim Verifikasi Pelaksanaan Verifikasi b. Pelaksanaan areal kerja Hutan Desa c. Pembinaan dan pengendalian				
2	Pertanian Hutan Desa	a. HPHD	Usulan permohonan HPHD	Verifikasi teknis/ kelembagaan usulan HPHD bersama provinsi	a. Penetapan Tim Verifikasi b. Memberikan HPHD kepada lembaga desa	Fasilitasi pemberian HPHD			Penyusunan dan pengendalian HPHD	Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa			

TUGAS, KEMENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB											Kategori
RUANG LINGKUP	DINAS KABUPATEN / KOTA	BUPATI / WALIKOTA	DINAS PROVINSI	GUBERNUR	UPT BPDAS	DITJEN BUK	DITJEN PLANOLOGI	DITJEN BPDAS-PS	MENTERI		
1. UPHK pada Hutan Desa	3 Fasilitasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa	4	5	6	7	8 Pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa	9	10 a. Pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa b. Rombongan dan pengendalian c. Verifikasi IUPHHK pada Hutan Desa d. Koordinasi pemberian IUPHHK pada Hutan Desa	11 a. Melakukan pelaksanaan IUPHHK pada Hutan Desa b. Penetapan TLU c. Verifikasi IUPHHK pada Hutan Desa d. Koordinasi pemberian IUPHHK pada Hutan Desa	12	
3. Rencana Kerja Ilak Pengelolaan Hutan Desa a. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHI) b. Rencana Tahunan Hutan Desa	Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa a. Fasilitasi penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa b. Pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa	Perintah dan pengendalian penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa di Kabupaten / Kota	a. Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa b. Pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa	Perencanaan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa di Provinsi	Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa		Fasilitasi pembuatan batas areal kerja Hutan Desa	Penyusunan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa Penyusunan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa	Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa		

